

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Pada pembuatan sistem Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak bagi Pegawai tetap, dibutuhkan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dengan spesifikasi sebagai berikut :

2.1.1 PERANGKAT KERAS (*HARDWARE*)

Spesifikasi kebutuhan perangkat keras (*hardware*) yang digunakan untuk membangun aplikasi ini :

1. Asus A43SJ.
2. Intel Pentium Dual Core B950.
3. Hardisk yang tersedia 320 Gygabyte.
4. RAM 2 Gbyte.
5. Printer Canon ip1980.

2.1.2 PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE*)

Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah :

1. Sistem Operasi yang digunakan adalah Windows 7, 32 bit.
2. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah JAVA.
3. Editor menggunakn Netbeans IDE 6.8.

4. Database yang digunakan adalah Mysql / AppServ Open Project 2.5.10.
5. Pembuatan Naskah menggunakan Microsoft Office 2007.
6. Laporan / atau output menggunakan i-Report-4.5.1
7. Flowchart System menggunakan Microsoft Visio 2010

2.2 PERANCANGAN TABEL

Perancangan tabel yang dibuat pada tugas akhir ini adalah :

1. Tabel Login
2. Tabel Wajib Pajak
3. Tabel Biaya Jabatan
4. Tabel PTKP
5. Tabel Tarif Pajak
6. Tabel Harta
7. Tabel Kewajiban
8. Tabel Anggota Keluarga
9. Tabel Hitung_pph_temp

Berikut adalah rincian dari tabel – tabel yang telah dibuat :

2.2.1 TABEL LOGIN

Tabel Login berfungsi untuk menyimpan data user yang akan digunakan untuk login.

Primary Key : --

Foreign Key : --

Tabel 2.1 Tabel Login

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Username	Varchar(25)	Nama User
2.	Password	Varchar(25)	Password

2.2.2 TABEL WAJIB PAJAK

Tabel wajib pajak berfungsi untuk menyimpan, mengubah data wajib pajak.

Primary Key : NPWP

Foreign Key :

Tabel 2.2 Tabel Wajib Pajak

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	NPWP*	Char(20)	Nomor Pokok Wajib Pajak
2.	Nama	Varchar(35)	Nama Wajib Pajak
3.	Pekerjaan	Varchar(25)	Pekerjaan Wajib Pajak
4.	Alamat	Varchar(35)	Alamat Wajib Pajak
5.	Gaji	Integer	Gaji sebulan Wajib Pajak
6.	Premi_jkk	Integer	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
7.	Premi_jaminan_kematian	Integer	Premi Jaminan Kematian
8.	Premi_jpk	Integer	Premi Jaminan Pelayanan Kesehatan
9.	Iuran_pensiun	Integer	Iuran Pensiun
10.	Iuran_jht	Integer	Iuran Jaminan hari tua
11.	Email	Varchar(35)	Email Wajib Pajak
12.	No_telepon	Char(12)	No Telepon Wajib Pajak
13.	Fax	Char(12)	Fax Wajib Pajak

2.2.3 TABEL BIAYA JABATAN

Tabel biaya jabatan berfungsi untuk menyimpan dan mengubah biaya jabatan pada PPh pasal 21 jika di kemudian hari ada perubahan biaya jabatan dari pemerintah.

Primary Key : id

Foreign Key :

Tabel 2.3 Tabel Biaya Jabatan

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Id*	Integer	Id Biaya Jabatan (auto increment)
2.	Persentase	Integer	Persentase Biaya Jabatan
3.	Jumlah_max	Integer	Besar Maksimum Biaya Jabatan

2.2.4 TABEL PTKP

Tabel PTKP berfungsi untuk menyimpan dan mengubah data PTKP jika dikemudian hari terjadi besaran perubahan PTKP dari pemerintah pusat.

Primary Key : No

Foreign Key :

Tabel 2.4 Tabel PTKP

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	No*	Integer	No Ptkp (auto increment)
2.	Nama_ptkp	Varchar(25)	Nama Ptkp
3.	Jumlah	Integer	Besar Ptkp

2.2.5 TABEL TARIF PAJAK

Tabel tarif berfungsi untuk menyimpan, mengubah data Tarif yang akan digunakan untuk penghitungan PPh yang terutang, jika dikemudian hari terjadi perubahan tarif maka tabel tarif bisa ubah sesuai peraturan pemerintah pusat.

Primary Key : id

Foreign Key :

Tabel 2.5 Tabel Tarif

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Id*	Integer	Id Tarif (auto increment)
2.	Jumlah_min	Integer	Jumlah Minimal Tarif
3.	Jumlah_max	Integer	Jumlah Maximal Tarif
4.	Persen	Integer(3)	Persentase Tarif

2.2.6 TABEL HARTA

Tabel harta berfungsi untuk menyimpan, mengubah dan menghapus data harta.

Primary Key : id

Foreign Key : NPWP

Tabel 2.6 Tabel Harta

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Id*	Integer	Id Harta (auto increment)
2.	NPWP**	Char(20)	NPWP Wajib Pajak
3.	Jenis_harta	Varchar(35)	Jenis Harta
4.	Tahun_harta	Char(4)	Tahun Perolehan Harta
5.	Harga	Integer	Harga Perolehan Harta

2.2.7 TABEL KEWAJIBAN

Tabel kewajiban berfungsi untuk menyimpan, mengubah dan menghapus data kewajiban.

Primary Key : id

Foreign Key : NPWP

Tabel 2.7 Tabel Kewajiban

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Id*	Integer	Id Kewajiban (auto increment)
2.	NPWP**	Char(20)	NPWP Wajib Pajak
3.	Nama	Varchar(35)	Nama Pemberi Pinjaman
4.	Alamat	Varchar(35)	Alamat Pemberi Pinjaman
5.	Tahun_kewajiban	Char(4)	Tahun Peminjaman
6.	Jumlah	Integer	Jumlah Pinjaman

2.2.8 TABEL ANGGOTA KELUARGA

Tabel Anggota keluarga berfungsi untuk menyimpan, mengubah data Tarif yang akan digunakan untuk penghitungan PPh yang terutang, jika dikemudian hari terjadi perubahan tarif maka tabel tarif bisa ubah sesuai peraturan pemerintah pusat.

Primary Key : id

Foreign Key : NPWP

Tabel 2.8 Tabel Anggota Keluarga

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Id*	Integer	Id Anggota Keluarga (auto increment)
2.	NPWP**	Char(20)	NPWP Wajib Pajak
3.	Nama_anggotakel	Varchar(35)	Nama Anggota Keluarga

4.	Tanggal_lahir	Date	Tanggal Lahir
5.	Hubungan_Kel	Varchar(20)	Hubungan Keluarga
6.	Pekerjaan	Varchar(20)	Pekerjaan

2.2.9 TABEL HITUNG PPH TEMP

Tabel Hitung pph temp berfungsi untuk menyimpan data perhitungan sementara dan jika ada perhitungan pajak yang baru data yang lama akan terhapus, karena tabel hitung pph temp hanya bersifat tabel temporary /atau tabel sementara, dan tidak untuk menyimpan data tahun pajak sebelumnya hanya menghitung untuk tahun pajak berikutnya.

Primary Key :

Foreign Key : NPWP

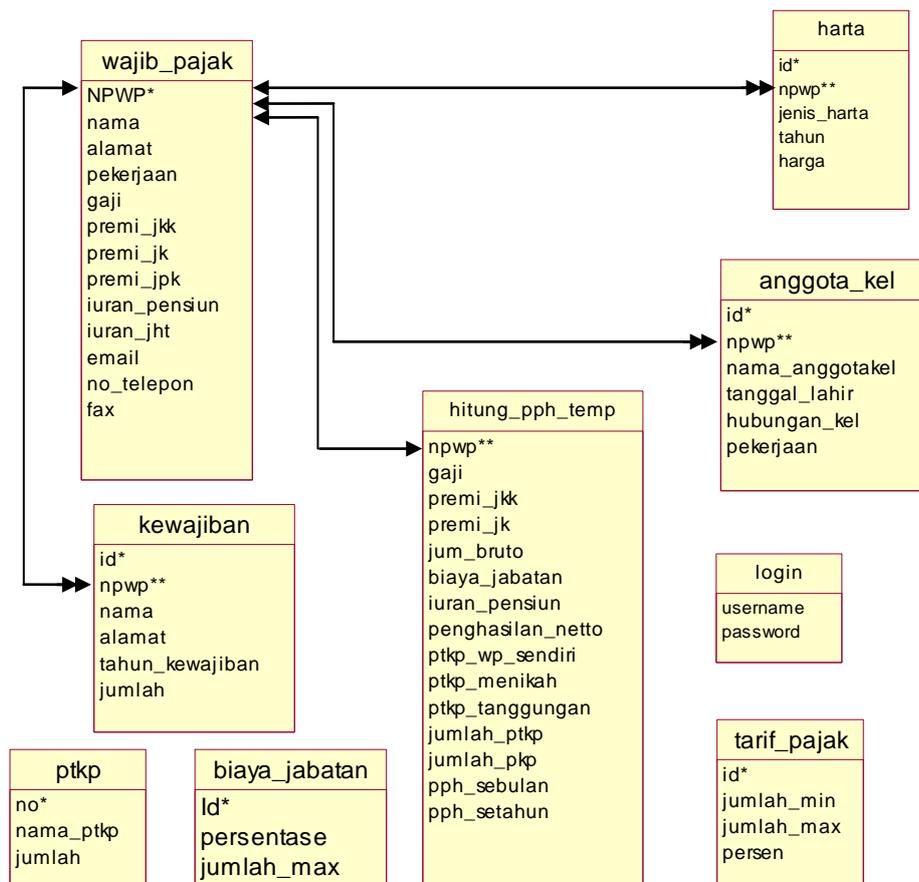
Tabel 2.9 Tabel Hitung PPh Temp

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	NPWP**	Char(20)	NPWP Wajib Pajak
2.	Gaji	Integer	Gaji Wajib Pajak
3.	Premi_jkk	Integer	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
4.	Premi_jk	Integer	Premi Jaminan Kematian
5.	Jum_bruto	Integer	Jumlah Bruto
6.	Biaya_jabatan	Integer	Biaya Jabatan
7.	Iuran_pensiun	Integer	Iuran Pensiun
8.	Penghasilan_netto	Integer	Penghasilan Netto
9.	PTKP_WP_sendiri	Integer	PTKP Wajib Pajak Pribadi
10.	PTKP_Menikah	Integer	PTKP Status Menikah
11.	PTKP_Tanggung	Integer	PTKP Banyaknya Tanggungan

12.	Jumlah_PTKP	Integer	Jumlah PTKP
13.	Jumlah_PKP	Integer	Jumlah Penghasilan Kena Pajak
14.	PPh_sebulan	Integer	Pajak Penghasilan Sebulan
15.	PPh_setahun	Integer	Pajak Penghasilan Setahun

2.3 RELASI ANTAR TABEL

Relasi antar tabel dari tabel – tabel yang dibutuhkan merupakan hubungan antara tabel satu dengan yang lainnya yang ditunjukkan dengan garis, yang bersifat *one to many*. Relasi antar tabel dapat lihat pada gambar 2.1.

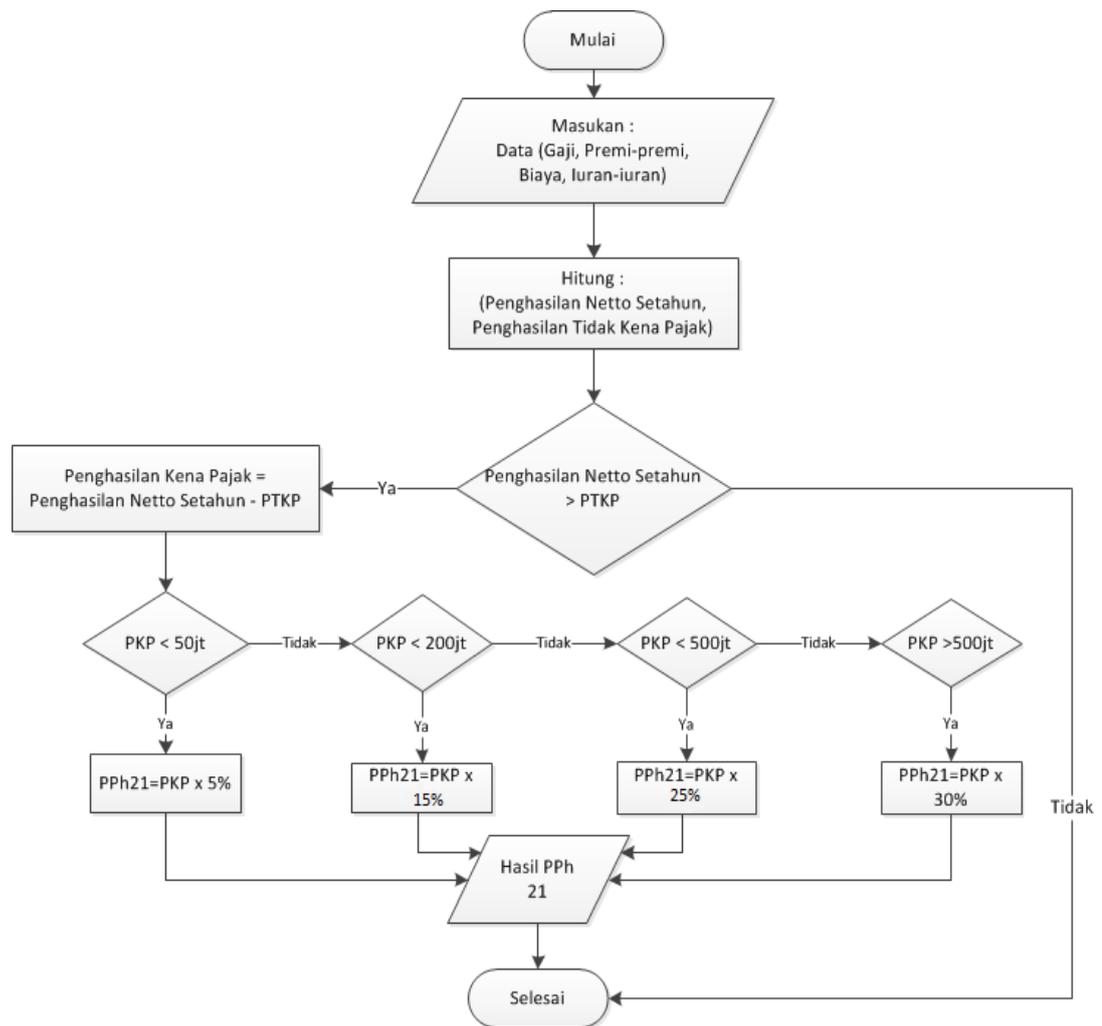


Gambar 2.1 Relasi Antar Tabel

- Tabel wajib pajak memiliki relasi dengan tabel harta (*one to many*) artinya satu wajib bisa memiliki lebih dari satu harta.
- Tabel wajib pajak memiliki relasi dengan tabel kewajiban (*one to many*) artinya satu wajib pajak bisa memiliki lebih dari satu kewajiban.
- Tabel wajib pajak memiliki relasi dengan tabel anggota keluarga (*one to many*) artinya satu wajib pajak bisa memiliki lebih dari satu anggota keluarga.
- Tabel login, ptkp, biaya_jabatan, tarif_pajak, dan hitung_pph_temp tidak termasuk ke dalam relasi.

2.4 FLOWCHART ALGORITMA

Flowchart algoritma digunakan untuk menggambarkan mekanisme kerja dari suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang akan menghasilkan suatu informasi. *flowchart algoritma* ini digambarkan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 *Flowchart Algoritma* Sistem Penghitungan “Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Pegawai Tetap”

Masukkan data gaji, premi, biaya jabatan dan iuran. Setelah itu proses hitung jumlah Penghasilan Netto Setahun, Penghasilan Tidak Kena Pajak kemudian cek apakah penghasilan netto setahun lebih besar dari PTKP, jika Tidak proses Selesai, jika Ya maka hitung PKP , Penghasilan Netto Setahun - PTKP. kondisi PKP lebih kecil dari 50 jt Ya jumlah PKP x 5% jika Tidak kondisi tarif sampai dengan 250 jt Ya jumlah PKP x 15%, jika Tidak kondisi tarif sampai dengan 500 jt Ya PKP x 25%,

jika Tidak kondisi tarif lebih besar dari 500 jt maka jumlah PKP dikalikan 30%, hasil akhir diperoleh Pajak Penghasilan pasal 21 / atau PPh 21.

2.5 PERANCANGAN MASUKAN

Dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak pegawai tetap, dibutuhkan beberapa perancangan masukan sebagai berikut :

1. Perancangan Masukan Data Wajib Pajak.
2. Perancangan Masukan Data Biaya Jabatan.
3. Perancangan Masukan Data PTKP.
4. Perancangan Masukan Data Tarif Pajak.
5. Perancangan Masukan Data Harta.
6. Perancangan Masukan Data Kewajiban.
7. Perancangan Masukan Data Anggota Keluarga.
8. Perancangan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berikut perancangan – perancangan masukan data yang diperlukan :

2.5.1 PERANCANGAN MASUKAN DATA WAJIB PAJAK.

Perancangan masukan data wajib pajak adalah untuk menyimpan data – data wajib pajak PPh pasal 21 untuk wajib pajak pegawai tetap. Perancangan masukan data wajib pajak digambarkan pada gambar 2.3.

NPWP	<input type="text"/>	Gaji Sebulan	<input type="text"/>
Nama Pegawai	<input type="text"/>	Premi JKK	<input type="text"/>
Pekerjaan	<input type="text"/>	Premi JK	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>	Premi JPK	<input type="text"/>
		Iuran Pensiun	<input type="text"/>
		Iuran JHT	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		
No.Telepon	<input type="text"/>		
Fax	<input type="text"/>		
	<input type="button" value="Simpan"/>	<input type="button" value="Ubah"/>	<input type="button" value="Hapus"/>

Gambar 2.3 Perancangan Masukan Data Wajib Pajak

2.5.2 PERANCANGAN MASUKAN DATA BIAYA JABATAN.

Perancangan masukan data biaya jabatan digunakan menyimpan data biaya jabatan, dan apabila ada perubahan pada biaya jabatan maka data tersebut bisa diubah dan dihapus. digambarkan pada *gambar 2.4*.

INPUT DATA BIAYA JABATAN

Persentase	<input type="text"/>
Jumlah max	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Ubah"/> <input type="button" value="Hapus"/>

Gambar 2.4 Perancangan Masukan Biaya Jabatan

2.5.3 PERANCANGAN MASUKAN DATA PTKP.

Perancangan masukan data PTKP digunakan untuk menyimpan data-data PTKP, dan apabila ada perubahan pada data PTKP maka data tersebut bisa diubah. digambarkan pada gambar 2.5.

INPUT DATA PTKP

Nama PTKP	<input type="text"/>
Jumlah	<input type="text"/>

Gambar 2.5 Perancangan Masukan Data PTKP

2.5.4 PERANCANGAN MASUKAN DATA TARIF PAJAK.

Perancangan masukan data tarif pajak digunakan untuk menyimpan tarif pajak, dan apabila ada perubahan pada tarif pajak maka data tersebut bisa diubah dan dihapus. digambarkan pada gambar 2.6.

INPUT DATA TARIF PAJAK

Jumlah min	<input type="text"/>
Jumlah max	<input type="text"/>
Persen	<input type="text"/>

Gambar 2.6 Perancangan Masukan Data Tarif Pajak

2.5.5 PERANCANGAN MASUKAN DATA HARTA.

Perancangan masukan data harta digunakan untuk mencatat semua harta yang dimiliki oleh wajib pajak pada akhir tahun. digambarkan pada gambar 2.7.

INPUT DATA HARTA

NPWP	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Nama Harta	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Tahun Perolehan	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Harga Perolehan	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 30%; margin-right: 10px;" type="button" value="Simpan"/> <input style="width: 30%; margin-right: 10px;" type="button" value="Ubah"/> <input style="width: 30%;" type="button" value="Hapus"/>	

Gambar 2.7 Perancangan Masukan Data Harta

2.5.6 PERANCANGAN MASUKAN DATA KEWAJIBAN.

Perancangan masukan data kewajiban digunakan untuk mencatat semua kewajiban pada akhir tahun. digambarkan pada gambar 2.8.

INPUT DATA KEWAJIBAN

NPWP	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Pemberi Pinjaman	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Alamat	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Tahun Peminjaman	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Jumlah Pinjaman	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 30%; margin-right: 10px;" type="button" value="Simpan"/> <input style="width: 30%; margin-right: 10px;" type="button" value="Ubah"/> <input style="width: 30%;" type="button" value="Hapus"/>	

Gambar 2.8 Perancangan Masukan Data Kewajiban

2.5.7 PERANCANGAN MASUKAN DATA ANGGOTA KELUARGA.

Perancangan masukan data anggota keluarga digunakan untuk mencatat anggota keluarga dari wajib pajak. digambarkan pada gambar 2.9.

INPUT DATA ANGGOTA

NPWP	<input type="text"/>
Nama Anggota Kel.	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>
Hubungan Kel.	<input type="text"/>
Pekerjaan	<input type="text"/>

Gambar 2.9 Perancangan Masukan Data Anggota Keluarga

2.5.8 PERANCANGAN MASUKAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

Perancangan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak bagi pegawai tetap, digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar digambarkan pada gambar 2.10.

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

NPWP	<input type="text"/>	Penghasilan Netto	<input type="text"/>
Gaji	<input type="text"/>	PTKP WP Pribadi	<input type="text"/>
Premi JKK	<input type="text"/>	PTKP Menikah	<input type="text"/>
Premi JK	<input type="text"/>	PTKP Tanggungan	<input type="text"/>
Premi JPK	<input type="text"/>	Jumlah PTKP	<input type="text"/>
Jumlah Bruto	<input type="text"/>	Jumlah PKP	<input type="text"/>
Biaya Jabatan	<input type="text"/>	PPh Sebulan	<input type="text"/>
Iuran Pensiun	<input type="text"/>	PPh Setahun	<input type="text"/>
Iuran JHT	<input type="text"/>		

Gambar 2.10 Perancangan Penghitungan PPh pasal 21

2.6 PERANCANGAN KELUARAN

Dari perancangan-perancangan masukan yang telah dibuat, maka dapat dibuat laporan perhitungan PPh pasal 21 untuk wajib pajak pegawai tetap sebagai berikut :

1. Perancangan Keluaran SPT Formulir 1721 A-1
2. Perancangan Keluaran SPT Formulir 1770 S.
3. Perancangan Keluaran SPT Formulir 1770 SS.
4. Perancangan Keluaran SPT Lampiran - I Formulir 1770 S – I.
5. Perancangan Keluaran SPT Lampiran – II Formulir 1770 S – II.

2.6.1 PERANCANGAN KELUARAN SPT FORMULIR 1721 A-1

Formulir ini digunakan oleh pemotong pajak PPh Pasal 21 untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh pasal 21 yang terutang untuk tahun takwin yang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/JHT yang jumlah penghasilan nettonya melebihi PTKP, dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin (tahun berdasarkan kalender berawal dari 1 Januari sampai 31 Desember) berakhir. digambarkan pada Gambar 2.11.

FORMULIR	1721 - A1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN I - A SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HATI TUA (JHT)	TAHU TAKWIN
NOMOR URUT NPWP PEMOTONG PAJAK NAMA PEMOTONG PAJAK ALAMAT PEMOTONG PAJAK NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT STATUS: <input type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING <small>K/ / TK / HB /</small> JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP JABATAN			
A RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :			
* PENGHASILAN BRUTO :			
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT			1.
2. TUNJANGAN PPh			2.
3. TUNJANGAN LAINNYA UANG LEMBUR DAN SEBAGANYA			3.
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA			4.
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA			5.
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21			6.
7. JUMLAH (1 s.d.6)			7.
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR			8.
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)			9.
* PENGURANGAN			
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7			10.
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8			11.
12. IURAN PENSUN / IURAN THT/JHT			12.
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)			13.
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (9-13)			14.
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA			15.
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DIBETAHUNKAN)			16.
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)			17.
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DIBETAHUNKAN (16 - 17)			18.
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DIBETAHUNKAN			19.
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA			20.
21. PPh PASAL 21 TERUTANG			21.
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI			22.
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah			22a.
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP			22b.
23. JUMLAH PPh PASAL 21			23.
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)			
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)			
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH			24.
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI	BULAN	TAHUN	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21	BULAN	TAHUN	
B TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN			
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	<input type="checkbox"/> KUJASA	(tempat)	Tanggal
NAMA LENGKAP NPWP			TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI DENGAN BENTUK INI

Gambar 2.11 Perancangan Keluaran SPT Formulir 1721 A1

2.6.2 PERANCANGAN KELUARAN SPT FORMULIR 1770 S

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan Lampirannya bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya dan/atau, yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, yang penghasilan nettonya lebih dari Rp. 60.000.000,- digambarkan pada gambar 2.12.

FORMULIR	1770 S	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK 2 0
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MEMPUNYAI PENGHASILAN : <input type="checkbox"/> DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA <input type="checkbox"/> DALAM NEGERI LAINNYA <input type="checkbox"/> YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	
PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI			
IDENTITAS	NPWP : <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/> PEKERJAAN : <input type="text"/> KLU : <input type="text"/> NO. TELEPON : <input type="text"/> - <input type="text"/> NO. FAKS : <input type="text"/> - <input type="text"/> PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA		
A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1 <small>[Disisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]</small> 2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 2 <small>[Disisi sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A]</small> 3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 3 <small>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar disisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]</small> 4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) 4 5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB 5 6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5) 6		
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/L <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/> 7 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) 8		
C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) 9 10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 10 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) 11		
D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Disisi dari Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian C Kolom (7)] 12 13 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 13 b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (11-12) 14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 14a b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) 14b c. FISKAL LUAR NEGERI 14c 15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c) 15		
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) 16 b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) <small>(13-15) TGL LUNAS TGL BLN THN</small> 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPK PASAL 17 C (WP PATUH) b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPK PASAL 17 D (WP TERTENTU) PAJAK		
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA	18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR 18 DIHITUNG BERDASARKAN a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		
G. LAMPIRAN	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan) d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri e. <input type="checkbox"/>		
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL <input type="text"/>			TANDA TANGAN

Gambar 2.12 Perancangan Keluaran SPT Formulir 1770 S

2.6.3 PERANCANGAN KELUARAN SPT FORMULIR 1770 SS

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 SS bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan penghasilan netto kurang dari Rp. 60.000.000,- dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi digambarkan pada gambar 2.13.

FORMULIR	1770 SS	SPT TAHUNAN	TAHUN PAJAK
	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 60 JUTA SETAHUN			
PERHATIAN <ul style="list-style-type: none"> • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* • BERTANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM 			
IDENTITAS	NPWP :	<input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>	
	PEKERJAAN :	<input type="text"/>	KLU : <input type="text"/>
	NO. TELEPON :	<input type="text"/>	NO. FAKS : <input type="text"/>
	PERUBAHAN DATA :	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN		Rp. <input type="text"/>	
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN		Rp. <input type="text"/>	
PERNYATAAN			
Dengan mengadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya mengatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.			TANDA TANGAN
TANGGAL <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;">TGL BLN THN</small>			<input type="text"/>
<small>*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS</small>			

Gambar 2.13 Perancangan Keluaran SPT Formulir 1770 SS

2.6.4 PERANCANGAN KELUARAN SPT LAMPIRAN I FORMULIR 1770 S - I

Lampiran I berisi daftar penghasilan lain selain dari pekerjaan misalnya dividen atau royalti. Kalau penghasilan Anda hanya dari pekerjaan saja, kosongkan saja bagian ini. Di Lampiran I ini juga ada daftar penghasilan yang bukan objek pajak seperti warisan. Pada umumnya juga bagian ini dikosongkan karena biasanya Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang bukan objek pajak. Bagian terakhir di Lampiran I ini adalah daftar PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain digambarkan pada gambar 2.14.

FORMULIR		1770 S - I		LAMPIRAN - I		SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		2 0	
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK - DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH					
N P W P									
NAMA WAJIB PAJAK									
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)									
NO	JENIS PENGHASILAN				JUMLAH PENGHASILAN				
(1)	(2)				(3)				
1	Bunga								
2	Dividen								
3	Royalti								
4	Sewa								
5	Penghargaan dan Hadiah								
6	Keuntungan dari Penjualan / Pengalihan Harta								
7	Penghasilan Lainnya								
JUMLAH BAGIAN A					JBA				
<small>Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)</small>									
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK									
NO	JENIS PENGHASILAN				JUMLAH PENGHASILAN				
(1)	(2)				(3)				
1	Bantuan / Sumbangan / Hibah								
2	Warisan								
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi								
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa								
5	Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak								
JUMLAH BAGIAN B					JBB				
BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH									
NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/25/DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
dst									
JUMLAH BAGIAN C					JBC				
<small>Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka (12)</small>									
<small>Catatan: *) - DTP : Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/25/DTP (Cantah : ditulis 21, 22, 23, 24, 25, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat diberikan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)</small>									
FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPIL DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI									
Halaman ke- <input type="text"/> dan <input type="text"/> halaman Lampiran-I									

Gambar 2.14 Perancangan Keluaran SPT Lampiran I 1770 S - I

2.6.5 PERANCANGAN KELUARAN SPT LAMPIRAN II FORMULIR 1770 S - II

Lampiran II berisi tiga bagian yaitu Bagian A tentang daftar penghasilan yang dikenakan PPh Final, bagian B tentang daftar harta yang Anda miliki dan bagian C tentang daftar hutang atau kewajiban yang Anda miliki. Silahkan isi sesuai dengan kondisi Anda. Usahakan daftar harta diisi karena membiarkannya kosong akan menimbulkan pertanyaan dari petugas pajak digambarkan pada gambar 2.15.

FORMULIR		1770 S - II		LAMPIRAN - II		TAMBAHAN	
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		2		0	
N P W P		NAMA WAJIB PAJAK		PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN	
BAGIAN A		PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN		DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI						
2	Bunga/Diskonto Obligasi yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek						
3	Penjualan Saham di Bursa Efek						
4	Hadiah Undian						
5	Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus						
6	Honorarium atas Beban APBN/APBD						
7	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan						
8	Sewa atas Tanah dan/atau Bangunan						
9	Bangunan yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah						
10	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final :						
10a	Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja						
10b	Penghasilan Anak dari Pekerjaan						
11	Penghasilan Lain yang dikenakan Pajak Final dan/ atau Bersifat Final						
JUMLAH BAGIAN A		JBA					
NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
dst							
JUMLAH BAGIAN B		JBB					
NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
dst							
JUMLAH BAGIAN C			JBC				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BERTUKUR INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-II

Gambar 2.15 Perancangan Keluaran SPT Lampiran II 1770 S - II